MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi, dan cara pengukuran. Manual IKU ini diharapakan dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Manual IKU Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Tahun 2023.

Deputi
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian,

Ditandatangani secara elektronik

Haryomo Dwi Putranto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

IKU. 1	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengkuran Indeks Profesional ASN.....	3
IKU. 2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN.....	4
IKU. 3	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN	5
IKU. 4	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS	6
IKU. 5	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi (Pemberian Tunjangan Kinerja/TPP) berbasis pada Hasil Evaluasi Jabatan.....	7
IKU. 6	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Berkriteria Baik	8
IKU. 7	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Kedeputian PMK	9
IKU. 8	Indeks Profesionalitas ASN BKN Kedeputian Bidang PMK BKN	10
IKU. 9	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	11
IKU. 10	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kedeputian Bidang PMK BKN	12
IKU. 11	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Kedeputian Bidang PMK BKN	13
IKU. 12	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BKN Kedeputian Bidang PMK	14
IKU. 13	Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit BPK/Inspektorat di Lingkup Kedeputian Bidang PMK	15

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*STAKEHOLDER PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam Menerapkan Manajemen ASN yang Efektif
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN merupakan salah satu fungsi Badan Kepegawaian Negara yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
Indikator Kinerja Utama	IKU 1. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	**Definisi**
	Berdasarkan Permenpan Nomor 28 Tahun 2018, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah termasuk instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretaritan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi daerah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
	Formula
	Persentase instansi pemerintah dihitung dari perbandingan total instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai pedoman dengan total instansi pemerintah keseluruhan.
	Tujuan
	Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sesuai pedoman diperlukan untuk mengetahui tingkat efektifitas Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Jenis Aspek Target	**(X) Kuantitas/output** ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Direktorat Jabatan ASN
Sumber Data	Aplikasi IP ASN
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Tingkat partisipasi Indeks Profesionalitas ASN yang rendah akan membuat hasil Indeks Profesionalitas ASN rendah
Mitigasi Resiko	Melakukan Sosialisasi/Workshop dan Monev pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Tabel Data

Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	85%	85%	89%	92.49%	100%	100%	100%	-	100%	-

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*CUSTOMER PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pembinaan Kepegawaian yang Berkualitas Prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya tingkat kepuasan pelanggan yang memuaskan atas pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Kedeputian PMK
Indikator Kinerja Utama	IKU 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Indeks yang diukur dengan menyelenggarakan survey ataupun menerima feedback kepuasan dari instansi pemerintah yang menerima layanan dari unit-unit di Kedeputian PMK
	Formula
	Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
	Tujuan
	Sebagai gambaran umpan balik pelayanan pembinaan untuk dijadikan upaya perbaikan kedepan
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk **(X) Tidak diturunkan (buat baru)**
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Komposit Hasil Survey dari 4 (Empat) Direktorat
Sumber Data	Hasil pengisian penerima layanan dari instansi/unit kerja internal dan eksternal
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui kualitas layanan di Kedeputian PMK
Mitigasi Resiko	Menyelenggarakan SOP yang jelas dalam pemberian pelayanan di tiap Direktorat

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	85	87.8	88	88.65	91	91,29	93		95	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan manajemen ASN. Kebijakan teknis manajemen ASN merupakan suatu peraturan teknis dalam rangka pengelolaan ASN untuk pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
Indikator Kinerja Utama	IKU 3. Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang ditetapkan dan diundangkan. Regulasi teknis merupakan peraturan teknis yang merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya. Regulasi teknis ini berupa Peraturan BKN. Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan sebagai panduan atau acuan terkait manajemen ASN. Instrumen ini diantaranya Keputusan Kepala BKN dan Surat Edaran.
	Formula
	Realisasi = Jumlah regulasi teknis dan instrumen yang berhasil ditetapkan / Jumlah draft regulasi teknis dan instrumen yang diusulkan x 100
	Tujuan
	Memberikan pedoman terhadap hal-hal yang bersifat teknis sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya serta merupakan bentuk kewenangan BKN dalam mengatur kebijakan teknis terkait manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Direktorat PPU
Sumber Data	Laporan rekapitulasi regulasi teknis dan instrumen yang sudah ditetapkan oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	() Maximize ( ) Minimize **(X) Stabilize**
Periode Pelaporan	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Resiko	Jika tidak dilakukan perhitungan, unit tidak memiliki data rancangan regulasi teknis yang menjadi prioritas untuk terlebih dahulu dibahas, ditetapkan, dan diundangkan
Mitigasi Resiko	Menghimpun usulan rancangan regulasi teknis ke unit-unit kerja di BKN sebelum akhir tahun berjalan untuk dimasukkan ke dalam program legislasi BKN di tahun berikutnya.

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisas
Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Tersusunnya Rencana Pengembangan Karier PNS Instansi Pemerintah
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Proses persiapan penyusunan rencana pengembangan karier Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui pelaksanaan Workshop/Bimtek secara fisik dan daring/online terhadap Peraturan BKN tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil.
Indikator Kinerja Utama	IKU 4. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyusun Rencana Pengembangan Karier PNS
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Ketersediaan data/dokumen Instansi Pemerintah peserta Workshop/Bimtek proses persiapan penyusunan rencana pengembangan karier Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan BKN tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil
	Formula
	Jumlah Instansi Pemerintah peserta Workshop/Bimtek yang memenuhi ketersediaan data/dokumen utk proses persiapan penyusunan rencana pengembangan karier Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan BKN tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil
	Tujuan
	Agar setiap instansi pemerintah memiliki rencana pengembangan karier
Satuan Pengukuran	Instansi
Jenis Aspek Target	**(X) Kuantitas/output** ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	( ) Tinggi **(X) Sedang** ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	**(X) Lead input** ( ) Lead Proses ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Direktorat Jabatan ASN
Sumber Data	Hasil penyusunan peraturan rencana pengembangan karier instansi pemerintah pusat dan daerah
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	( ) Maximize **(X) Minimize** ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Belum terpetakannya rencana pengembangan karier PNS Instansi Pemerintah serta rencana pengembangan karier tidak berjalan
Mitigasi Resiko	Peningkatan kebijakan rencana pengembangan karier PNS dan pengendalian penyusunan rencana pengembangan karier

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	20	68	137	137	137	137	20		46	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Implementasi Kebijakan Manajemen Kompensasi ASN pada Instansi
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terlaksananya penerapan Kebijakan Kompensasi ASN oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
Indikator Kinerja Utama	IKU 5. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	**Definisi**
	Instansi Pemerintah telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN diukur berdasarkan persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan gaji, fasilitas, Sistem Pemberian Tunjangan Kinerja /TPP berdasarkan Kelas Jabatan dan Harga Jabatan, penerapan kebijakan pensiun, perlindungan dan penghargaan berdasarkan Kebijakan Teknis yang berlaku
	Formula
	R/T x 100 Dimana: R = Jumlah Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN T = Jumlah Instansi Pemerintah (624 instansi terdiri dari 82 instansi pusat dan 542 instansi daerah)
	Tujuan
	Untuk melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Kebijakan Kompensasi ASN dengan melihat persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN sesuai dengan ketentuan Kebijakan Teknis yang berlaku
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input ( ) Lead Proses **(X) Lag Output** ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung **(X) Dipersempit** ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Direktorat Kompensasi ASN
Sumber Data	Laporan Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN
Jenis Penghitungan Data	**(X) Akumulasi** ( ) Ratarata ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Row Data **(X) Row Data**
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran (X) Tahunan
Resiko	Jika tidak dilaksanakan maka Direktorat Kompensasi tidak dapat mengetahui persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN
Mitigasi Resiko	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengetahui persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Kebijakan Kompensasi ASN

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	40%	47.85%	60%	65.38%	70%	79%	85%		100%	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Implementasi Kebijakan Manajemen Kinerja ASN pada Instansi
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Penyelenggaraan pembinaan manajemen kinerja ASN pada instansi untuk meningkatkan perbaikan pengelolaan manajemen kinerja ASN sekaligu sebagai upaya mendorong perbaikan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen kinerja ASN pada instansi pemerintah
Indikator Kinerja Utama	IKU 6. Persentase Instansi Pemerintah yang telah Menerapkan Kebijakan Manajemen Kinerja ASN berkriteria baik
Deskripsi Indikator Kinerja utama	**Definisi**
	Proses pembinaan yang dilakukan pada instansi pemerintah dalam manajemen Kinerja ASN dalam bentuk evaluasi menggunakan instrumen yang tervalidasi, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan lanjutan untuk mendapatkan peningkatan penilaian dengan minimal kriteria akhir adalah Baik.
	Formula
	Instrumen yang digunakan bertujuan untuk melihat gambaran umum implementasi sistem manajemen kinerja pada Instansi Pemerintah . Instrumen tersebut terdiri dari 35 soal, mencakup 6 aspek, yakni 1) Sistem Manajemen Kinerja, 2) Sumber Daya Manusia, 3) IT, 4) Proses, 5) Organisasi, dan 6) Komitmen Pimpinan. Formula perhitungan : $\frac{Jumlah\ instansi\ pemerintah\ dengan\ kategori\ minimal\ baik}{Jumlah\ instansi\ pemerintah\ yang\ dilakukan\ identifikasi\ implementasi\ SMK}$ X 100 %
	Tujuan
	Tujuan dilaksanakan pembinaan adalah terwujudnya instansi pemerintah yang menyelenggarakan manajemen ASN sesuai dengan aturan dan mengedepankan penilaian kinerja yang baik sejak perencanaan hingga tindak lanjut serta pengelolaan manajemen penilaian kinerja yang terintegrasi dengan BKN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	( ) Tinggi ( ) Sedang **(X) Rendah**
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input ( ) Lead Proses ( ) Lag Output **(X) Lag Outcome**
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	Direktorat Kinerja ASN
Sumber Data	Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan Penilaian Kinerja Pegawai
Jenis Penghitungan Data	**(X) Akumulasi** ( ) Ratarata ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Instansi kurang kooperatif dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan
Mitigasi Resiko	Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kantor Regional, sehingga dapat meningkatkan instansi untuk mau dibina

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	40%	75.00%	55%	50%	70%	71,67%	85%		100%	

MANUAL IKU
DEPUTI PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kedeputian PMK
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang PMK dalam mewujudkan Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, serta memberikan Pelayanan Pembinaan Kepegawaian yang berkualitas Prima
Indikator Kinerja Utama	IKU 7. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Kedeputian PMK
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Ukuran ini mengukur jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang PMK pada 4 Direktorat yaitu : 1) Direktorat Kinerja ASN, 2) Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, 3) Direktorat Kompensasi ASN, 4) Direktorat Jabatan ASN
	Formula
	Jumlah rencana laporan monev dengan Laporan Monev yang disusun dari anggaran dan program yang ada di lingkungan Deputi Bidang PMK. Dokumen monev tersebut berasal dari laporan monitoring dan evaluasi masing-masing direktorat, mencakup 1. Direktorat Kinerja ASN, 2. Direktorat Peraturan Perundang-undangan, 3. Direktorat Kompensasi ASN, 4. Direktorat Jabatan ASN
	Tujuan
	Mengetahui pencapaian pelaksanaan kinerja di lingkungan Deputi Bidang PMK
Satuan Pengukuran	Dokumen
Jenis Aspek Target	**(X) Kuantitas/output** ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input ( ) Lead Proses **(X) Lag Output** ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk **(X) Tidak diturunkan (buat baru)**
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Program Deputi Bidang PMK dari 4 Direktorat di Deputi Bidang PMK
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi **(X) Ratarata** ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	( ) Hasil Penghitungan Row Data **(X) Row Data**
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Tidak terpetakannya kegiatan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Mitigasi Resiko	Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan dilingkungan Deputi Bidang PMK;

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	6	6	4	4	4	4	4		4	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya ASN BKN yang profesional di Lingkup Kedeputian PMK
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya ASN BKN yang kompeten bermakna bahwa Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menerima mandat sebagai unit yang berfungsi mewujudkan ASN BKN yang memiliki kompetensi tinggi, profesional dalam bekerja dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya
Indikator Kinerja Utama	IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN BKN Kedeputian PMK BKN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.
	Formula
	$\mathrm{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{IP}_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
	Tujuan
	Untuk digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai BKN dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai BKN secara organisasional
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	( ) Tinggi **(X) Sedang** ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input( ) Lead Proses **(X) Lag Output** ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN di BKN
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Rata-rata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Tidak terpetakannya tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang PMK
Mitigasi Resiko	Peningkatan kompetensi dan kinerja di lingkungan Deputi Bidang PMK

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	77	-	77	78.12	80	79.96	80		80	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya Sistem Informasi ASN yang Handal dan Mudah diakses
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Sasaran ini bertujuan agar sistem informasi di Kedeputian Bidang PMK terintegrasi satu sama lain dan juga mudah diakses oleh stakeholder yang terlibat
Indikator Kinerja Utama	IKU 9. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Ukuran yang menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Kedeputian PMK. Sistem informasi minimal yang digunakan terdiri dari Presensi online, sipendekar, e-kinerja, spse,sioni, SIPEPI, e-travel, DS, Simonbaja, honor, sptb, siava
	Formula
	IKU = (Jumlah sistem informasi yang digunakan/Total sistem informasi yang disediakan) x 100%
	Tujuan
	Untuk mengukur penerapan sistem informasi yang terstandar (yang dikelola Sekretariat Utama), di lingkungan Kedeputian PMK
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Kuesioner penggunaan aplikasi di lingkungan Kedeputian PMK
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Jika tidak diukur maka sistem informasi yang diterapkan di internal lingkungan Kedeputian PMK belum dikatakan berkualitas
Mitigasi Resiko	Upaya standarisasi seluruh sistem informasi yang dikelola oleh Settama BKN, dan penerapan di Lingkungan Kedeputian PMK

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi di lingkup kedeputian PMK yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Kedeputian PMK yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan primamenggambarkan birokrasi Deputi Bidang PMK BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja Utama	IKU 10. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kedeputian PMK BKN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Indeks yang menunjukkan kumulatif nilai di area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Serta komulatif pada komponen hasil (Opini BPK, survey internal integritas, dll)
	Formula
	Rumus Penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Per Men PAN RB No. 25 Tahun 2020
	Tujuan
	Untuk melakukan penilaian perubahan organisasi di BKN
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	( ) Tinggi **(X) Sedang** ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Hasil pencapaian Kelompok Kerja area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kedeputian PMK
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Tidak terpetakan area yang membutuhkan perbaikan di BKN
Mitigasi Resiko	Penguatan agenda POKJA dalam mendukung ketercapaian perubahan dalam Reformasi Birokrasi BKN

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	32	34.94	35	32.28	35	30.23	35		36	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran di lingkup kedeputian PMK BKN secara efisien dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Definisi: Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Kedeputian PMK yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan primamenggambarkan birokrasi Deputi Bidang PMK BKN yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan
Indikator Kinerja Utama	IKU 11. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup kedeputian PMK BKN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Deputi Bidang PMK BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari Perencanan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja
	Formula
	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kriteria Penilaian Nilai AKIP : 0 – 30 = Sangat Kurang 30 – 50 = Kurang 50 – 60 = Cukup 60 – 70 = Baik 70 – 80 = Sangat Baik 80 – 90 = Memuaskan 90 – 100 = Sangat Memuaskan
	Tujuan
	1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP 2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output **(X) Kualitas/mutu** ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	**(X) Lead input** ( ) Lead Proses ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	**(X) Cascading Peta** ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan Inspektorat BKN
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi ( ) Ratarata **(X) Nilai Posisi Akhir**
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Jika tidak dilakukan pengukuran, implementasi AKIP tidak bisa dievaluasi
Mitigasi Resiko	Penguatan pada aspek siklus manajemen kinerja

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	75	60.64	76	64.46%	77	70.6	78		79	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran di lingkup Kedeputian PMK BKN secara efisien dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di Kedeputian PMK dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan
Indikator Kinerja Utama	IKU 12. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran BKN kedeputian PMK
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Nilai kinerja anggaran BKN memperlihatkan seberapa besar serapan baik anggaran maupun fisik yang ada di Kedeputian PMK. Semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran
	Formula
	Jumlah serapan anggaran dan fisik Kedeputian PMK dibandingkan dengan perencanaan anggaran dan fisik yang sudah disusun
	Tujuan
	Untuk memperlihatkan efektivitas dalam melakukan penyerapan anggaran maupun fisik yang sudah direncanakan sebelumnya
Satuan Pengukuran	Nilai
Jenis Aspek Target	**(X) Kuantitas/output** ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses** ( ) Lag Output( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	**(X) Adopsi langsung** ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Laporan hasil penyerapan anggaran dan fisik keseluruhan unit di Kedeputian PMK
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi **(X) Ratarata** ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan
Resiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui efektivitas serapan anggaran dan fisik di lingkungan Deputi Bidang PMK
Mitigasi Resiko	Monitoring serapan anggaran dan fisik

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	87%	96.80%	90%	98.16%	93%	98.57	96.25%		98%	

MANUAL IKU
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Prespektif	*LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE*
Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran di lingkup Kedeputian PMK BKN secara efisien dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi: Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Kedeputian PMK BKN dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan
Indikator Kinerja Utama	IKU 13. Persentase tindak lanjut hasil audit BPK/Inspektorat di lingkup Kedeputian PMK
Deskripsi Indikator Kinerja utama	Definisi
	Indikator ini memperlihatkan bahwa tindak lanjut atas temuan hasil audit Inspektorat/BPK terkait laporan keuangan yang ada di lingkungan Kedeputian PMK baik di Direktorat Kinerja ASN, Direktorat Kompensasi ASN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan, dan Direktorat Jabatan ASN ditindaklanjuti oleh unit terkait
	Formula
	Perbandingan Temuan yang ditindaklanjuti dengan keseluruhan temuan dikalikan 100%
	Tujuan
	Untuk memperlihatkan kepatuhan unit atas tindak lanjut atas rekomendasi BPK/Inspektorat
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	**(X) Kuantitas/output** ( ) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU	**(X) Tinggi** ( ) Sedang ( ) Rendah
Tingkat Validitas IKU	( ) Lead input **(X) Lead Proses (X) Lag Output** ( ) Lag Outcome
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta **(X) Cascading Non Peta** ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung **(X) Dipersempit** ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan (buat baru)
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	4 (Empat) Direktorat di lingkungan Deputi Bidang PMK
Sumber Data	Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan Oleh BPK/Inspektorat
Jenis Penghitungan Data	( ) Akumulasi **(X) Rata-rata** ( ) Nilai Posisi Akhir
Status Data	**(X) Hasil Penghitungan Row Data** ( ) Row Data
Polarisasi Indikator Kinerja	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
Resiko	Jika tidak melakukan penghitungan, tidak diketahui kepatuhan unit terhadap rekomendasi temuan BPK/Inspektorat
Mitigasi Resiko	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tabel Data										
Periode pelaporan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	